

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara majemuk terdiri atas beragam suku, ras, etnis, agama, budaya, dan bahasa. Masyarakat mengenal keberagaman Indonesia sebagai perbedaan yang tetap satu dalam tenun Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari kakawin Sutasoma karangan Mpu Tantular yang diperkirakan sekitar abad 14 pada zaman kerajaan Majapahit Rizki & Djufri, (2021, hlm. 20). Semboyan ini juga ditegaskan dalam pasal 36A UUD NRI Th. 1945 bahwa lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Kemajemukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat tepat dijadikan dasar bagi kehidupan sosial bermasyarakat dan kebangsaan negara Indonesia (Kemendikbud et al., 2017). Kemajemukan bila dicermati adalah sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dan dirawat. Kemajemukan ini bisa kita rasakan sebagai akibat realitas kondisi masyarakat yang super majemuk. Bambang (2018, hlm. 32) mengemukakan bahwa kemajemukan harus disikapi dengan melakukan yang terbaik berdasarkan realitas pluralistik, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dalam kemajemukan. Hal ini menandakan bahwa betapa penting dan mendasarnya terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, apabila kemajemukan tidak dikelola dengan baik, maka sebaliknya akan menjadi suatu ancaman bagi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mahfud, C (2009, hlm. 10) menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang majemuk, baik dari segi budaya lokal, suku, agama, suku bangsa, dan golongan, perlu menyusun konsep pendidikan kebhinekaan untuk memperkuat jati diri bangsa. Dalam kerangka itu, pendidikan kebhinekaan menjadi faktor penting dalam penanaman sifat multikultural karena dengan pendidikan secara ideal akan membentuk manusia yang baik. Sementara menurut Wahab dan Sapriya (2011, hlm. 311) bahwa yang dikategorikan sebagai warga negara baik adalah warga negara yang memahami dan mampu menjalankan hak dan

kewajibannya sebagai individu warga negara yang memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial serta mematuhi dan melaksanakan hukum, aturan, atau perundang-undangan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang mematuhi aturan, menjalankan hak dan kewajibannya termasuk menghargai perbedaan dalam masyarakat adalah warga negara yang baik. Sehingga dalam membentuk warga negara yang baik salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu menghargai keberagaman melalui pendidikan kebhinekaan.

Pendidikan kebhinekaan sebagaimana fungsinya dalam konteks kebangsaan yaitu berfungsi untuk memperkuat semangat nasionalisme dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa (Kemendikbud, 2017). Pendidikan kebhinekaan, selain untuk menghargai perbedaan dapat juga dijadikan sebagai alat perdamaian untuk mencegah tindak kekerasan. Hal ini disebabkan oleh pendidikan nasional yang tidak bisa lepas dari nilai Bhinneka Tunggal Ika yang mendukung nilai-nilai seperti: inklusif, keterbukaan, kedamaian dan kebersamaan, kesetaraan, toleransi, musyawarah disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda (Setyaningsih, 2017, hlm. 71). Dari pemahaman tersebut, tujuan pendidikan kebhinekaan sebenarnya adalah untuk membangun sebuah pemahaman dan sikap menghargai perbedaan, mendorong sikap adil dan tidak diskriminatif terhadap kelompok lain dan kemauan untuk melindungi masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis.

Dalam aspek pendidikan nasional, kesadaran akan perlunya pendidikan kebhinekaan tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU. Sisdiknas). Pada BAB III pasal 2 bahwa asas atau prinsip pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM), nilai agama, nilai multikultur dan kemajemukan atau pluralisme. Oleh karena itu, segala kebijakan pendidikan yang diskriminatif dan tidak menghormati kebhinekaan merupakan sebuah penyangkalan terhadap UU Sisdiknas.

Berdasarkan visi misi Presiden Jokowi Widodo untuk melakukan aktualisasi dalam menyikapi perbedaan dan keragaman tertuang dalam Nawa Cita Sembilan Agenda Perubahan, dimana agenda kesembilan menekankan

Rahyudi Dwiputra, 2023

**MEMBANGUN NILAI-NILAI KEBHINEKAAN PADA PESERTA DIDIK MELALUI PEMBELAJARAN PKn DALAM MEMPERKUAT PERSATUAN INDONESIA (Studi Kasus di SMAS Golden Gate Makassar)**  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pentingnya penguatan kebhinekaan dan penguatan restorasi sosial melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, telah dituangkan dalam 3 arah kebijakan dan strategi pembangunan yaitu: (a) Pendidikan karakter dan budi pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal; (b) Perlindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khazanah budaya bangsa; dan (c) Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan.

Namun dalam Visi Misi Presiden Jokowi Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode kedua (2019-2024) tidak lagi berfokus pada agenda pentingnya penguatan kebhinekaan dan penguatan restorasi sosial melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga, melainkan Visi-Misi yang direncanakan lebih berfokus diantaranya, 1) Pembangunan Infrastruktur, 2) Pembangunan Sumber Daya Manusia, 3) Mengundang Investasi, 4) Mereformasi Birokrasi. Padahal jika ditinjau dari nawajita sebelumnya pada periode pertama, penguatan kebhinekaan menjadi salah satu prioritas pembangunan Indonesia. Sehingga dalam tataran praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih saja dijumpai fenomena paradoks antara semangat ber-NKRI dengan kasus intoleransi, etnosentrisme, fanatisme kelompok, kedaerahan seperti sukuisme, kolusi, dan nepotisme.

Menurut Soerjono, (2006, hlm. 91) salah satu penyebab terjadinya konflik perbedaan kepentingan atau perbedaan pendirian adalah apabila dua individu masing-masing memiliki pandangan yang sama sekali bertentangan tanpa kompromi, kemudian menarik kesimpulan yang berbeda dan cenderung bersifat tidak toleran, maka dapat dipastikan akan muncul konflik tertentu. Oleh karena itu perlu memperkuat nilai kebhinekaan untuk menyikapi perbedaan demi membangun komitmen bersama sebagai komponen bangsa dan warga negara mengenai persatuan dan kesatuan Indonesia.

Melihat dari realitas fenomena paradoks ini, penelitian Djalong (2019, hlm. 24) mengindikasikan kegagalan dalam mensosialisasikan nilai toleransi keberagaman. Dengan muatan Kurikulum 2013, Djalong menunjukkan

ketidakjelasan arahan dari dokumen kurikulum 2013 mengenai beberapa persoalan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti toleransi, kewarganegaraan, dan kemajemukan budaya-agama di Indonesia. Dengan demikian, pendidikan memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu khususnya di lingkup persekolahan. Bagi peserta didik, sekolah merupakan lingkungan kehidupan sosial untuk belajar dan mengalami secara langsung perwujudan makna Bhinneka Tunggal Ika (Farisi, 2015, hlm. 136). Oleh karena itu, sekolah harus dikelola dengan baik dan mengedepankan prinsip-prinsip pedagogik yang terbuka dan berkemajuan.

Fakta sosial kemajemukan menunjukkan bahwa Indonesia adalah negeri yang harus dibangun dengan nilai-nilai kebhinekaan. Membangun nilai-nilai kebhinekaan dirasa perlu untuk melakukan penelitian untuk membangun nilai-nilai kebhinekaan pada peserta didik. Sehingga nilai-nilai kebhinekaan dapat dijadikan sebagai pemahaman dasar bagi peserta didik untuk merawat kemajemukan yang telah lama membudaya dalam masyarakat Indonesia. Suryadi (2011, hlm. 308) mengungkapkan bahwa apabila kemajemukan didukung oleh semangat toleransi yang tinggi dari warga negaranya, maka lanskap bangsa Indonesia tidak tersekat menurut kamus kepentingannya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat penting untuk memberikan pemahaman dan membentuk sikap kebhinekaan pada peserta didik melalui pemahaman tentang kultur, tradisi, adat, serta nilai-nilai budaya dari masing-masing etnis, agama, suku, ras dan daerah.

Pendidikan mengenai Bhinneka Tunggal Ika atau kebhinekaan sebenarnya sudah banyak diajarkan melalui lembaga pendidikan formal di sekolah-sekolah, mulai pada tingkat sekolah dasar bahkan sampai di tingkat perguruan tinggi. Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan salah satunya melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) atau Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Dalam pelajaran PKn dalam Kurikulum 2013 termuat materi tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk pengejawantahan filosofi kesatuan sebagai dasar keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Kemendikbud (2016) Bhinneka Tunggal Ika menjadi bagian dari buku teks PKn untuk peserta didik. Namun, menurut Utami & Widiadi (2016)

permasalahan umum yang pada kenyataannya saat ini adalah materi buku teks yang bermuatan Bhinneka Tunggal Ika masih sangat kurang dan menyajikan uraian terbatas tentang keberagaman dan kesadaran akan perbedaan yang ada. Sementara dalam buku panduan tentang Empat Pilar Kehidupan berbangsa dan bernegara (MPR RI 2012) menyajikan materi Bhinneka Tunggal Ika dalam uraian atau penjelasan yang relatif sedikit (Narmoatmojo et al., 2020). Materi Bhinneka Tunggal Ika merupakan materi yang relatif baru jika dibanding dengan materi utama PKn lainnya yang sudah ada yaitu Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, padahal menurut Setyaningsih (2017, hlm. 78) nilai-nilai yang ada dalam Bhinneka Tunggal Ika mampu memunculkan semangat membangun toleransi dan anti diskriminasi terhadap peserta didik.

Lembaga pendidikan formal, khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat) yang merupakan salah satu instrumen dalam konteks pendidikan nasional dalam memprogramkan secara kurikuler PKn menjadi wadah dalam membina warga negara yang berbhineka. Oleh karena itu, sekolah sangat penting untuk dijadikan pilihan *setting* dalam membentuk warga negara yang akan memahami makna nilai Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di semua jenjang dan jenis sekolah secara pragmatik memiliki *psychopedagogis*, yaitu membina warga negara yang demokratis dalam ruang lingkup pendidikan di lembaga pendidikan formal maupun non formal. Sapriya & Winataputra (2010, hlm. 12) menyatakan bahwa tugas PKn dengan paradigma barunya mengembangkan tiga fungsi utama, yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelegence*), membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*). Senada dengan hal tersebut, Sementara Sapriya (2010, hlm. 111) menyatakan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam mengembangkan pendidikan demokrasi adalah mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) dan partisipasi warga negara (*civic participation*).

Kesamaan kedua pendapat di atas dapat diartikan bahwa kecerdasan warga negara yang dikembangkan berfungsi untuk membentuk warga negara yang baik

bukan hanya dalam dimensi rasional, tetapi juga dalam dimensi spiritual, emosional dan sosial, sehingga paradigma baru PKn dapat bersifat multidimensional. Oleh karenanya, PKn dengan paradigma barunya mengamanatkan agar demokrasi dilaksanakan secara cerdas dan berbudaya. Demokrasi tidak lagi hanya dilaksanakan dengan cara memaksakan kehendak tanpa dikemas dalam bingkai peraturan perundang-undangan. Demokrasi apabila diterjemahkan dengan cara destruktif, intimidatif dan tidak menggunakan akal sehat, maka dapat dipastikan akan terjadi anarkisme sehingga menyalahi nilai-nilai demokrasi dan bertentangan dengan tujuan PKn.

Melalui pembelajaran PKn sebagai sarana membangun dan menanamkan nilai-nilai kebhinekaan, tidak hanya menanamkan pemahaman lebih benar terkait demokrasi, HAM, politik, hukum dan budaya, tetapi berpegang pada nilai Bhinneka Tunggal Ika. Membangun nilai-nilai kebhinekaan diharapkan dapat mendukung perkembangan demokrasi yang tengah tumbuh di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang multi etnis, suku bangsa, budaya, agama, ekonomi, politik untuk menuju masyarakat madani Indonesia atau Indonesia baru yang dicita-citakan mampu membentuk warga negara yang memiliki kesadaran demokrasi. Dengan demikian, jika peserta didik memiliki kesadaran berdemokrasi maka bentuk intoleransi, eksklusif dan kekerasan yang berujung pada konflik horizontal maupun vertikal dapat dicegah.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka nilai-nilai kebhinekaan menjadi aspek utama dalam membentuk sikap peserta didik yang berbhineka dalam mata pelajaran PKn, maka dari itu harus dihayati dan dihidupkan dalam lingkungan akademik, sehingga nilai inklusif, keterbukaan, kedamaian, kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan keadilan sosial menjadi sasaran dari pembentukan watak warga negara. Dengan nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menanamkan benih generasi muda yang toleran dan berperilaku damai.

Oleh karena itu, perlu kajian ilmiah agar penjabaran dari nilai-nilai kebhinekaan dapat terwujud sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Kemudian dengan nilai tersebut dalam mata pelajaran PKn dapat dikembangkan sebagai sarana membangun nilai-nilai kebhinekaan peserta didik. Sehingga penelitian ini mengkaji bagaimana mata pelajaran PKn mewujudkan peserta didik yang berkater

kuat agar mampu mewujudkan kesadaran sebagai warga negara yang baik dan cerdas, serta memiliki karakteristik nilai-nilai yang dibutuhkan dalam membina toleransi.

Penelitian ini membahas tentang nilai-nilai kebhinekaan sebagai landasan pijak bagi warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan yang beragam. Kebhinekaan memiliki nilai persatuan dan kesatuan, serta menjunjung tinggi hak-hak setiap individu maupun kelompok. Selanjutnya, mata pelajaran PKn dengan membangun nilai-nilai kebhinekaan sebagai sarana pembentuk karakter yang toleran. Untuk itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Membangun Nilai-Nilai Kbhinekaan Pada Peserta Didik Melalui Pembelajaran PKn dalam Memperkuat Persatuan Indonesia” (Studi Kasus di SMAS Golden Gate).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, secara umum rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun nilai-nilai kebhinekaan pada peserta didik melalui pembelajaran PKn dalam memperkuat persatuan Indonesia di SMAS Golden Gate.

Agar lebih terarah dan terfokus, maka rumusan masalah di atas dapat dikembangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai batasan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran PKn di SMAS Golden Gate dalam membangun nilai-nilai kebhinekaan peserta didik sebagai upaya memperkuat persatuan Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PKn di SMAS Golden Gate dalam membangun nilai-nilai kebhinekaan pada peserta didik sebagai upaya memperkuat persatuan Indonesia?
3. Bagaimana evaluasi keberhasilan pembelajaran PKn di SMAS Golden Gate dalam membangun nilai-nilai kebhinekaan pada peserta didik sebagai upaya memperkuat persatuan Indonesia?
4. Bagaimana dampak pembelajaran PKn di SMAS Golden Gate dalam membentuk sikap kebhinekaan pada peserta didik sebagai upaya memperkuat persatuan Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dibagi menjadi bagian umum dan khusus. Pada bagian umum penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan mengorganisasikan isi ataupun nilai-nilai kebhinekaan yang akan dibangun pada peserta didik melalui pembelajaran PKn, sehingga dapat memperkuat persatuan di SMAS Golden Gate. Secara khusus penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis perencanaan pembelajaran PKn di SMAS Golden Gate dalam membangun nilai-nilai kebhinekaan pada peserta didik sebagai upaya memperkuat persatuan Indonesia.
2. Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pembelajaran PKn di SMAS Golden Gate dalam membangun nilai-nilai kebhinekaan pada peserta didik sebagai upaya memperkuat persatuan Indonesia.
3. Mengkaji dan menganalisis evaluasi keberhasilan pembelajaran PKn di SMAS Golden Gate dalam membangun nilai-nilai kebhinekaan pada peserta didik sebagai upaya memperkuat persatuan Indonesia.
4. Mengkaji dan menganalisis dampak pembelajaran PKn di SMAS Golden Gate dalam membentuk sikap kebhinekaan peserta didik sebagai upaya memperkuat persatuan Indonesia.

### **1.4 Manfaat / Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini berjudul “Membangun Nilai-Nilai Kebhinekaan Pada Peserta Didik Melalui Pembelajaran PKn dalam Memperkuat Persatuan Indonesia di SMAS Golden Gate Makassar. Dalam penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat dari Segi Teori**

Manfaat dari segi teoritis dapat memberikan kajian tentang bagaimana mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat membangun nilai-nilai kebhinekaan sebagai upaya membentuk sikap kebhinekaan peserta didik yang toleran dalam mencegah konflik perpecahan sehingga semakin memperkokoh dan memperkuat persatuan Indonesia.

#### **1.4.2 Segi Kebijakan**

Dari segi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai konsep pengembangan Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan dalam rangka membentuk sikap kebhinekaan yang toleran pada peserta didik melalui pembangunan nilai-nilai kebhinekaan, sehingga diharapkan dapat memberikan ruang khusus untuk pengembangan, terkhusus pada mata pelajaran yang mengandung nilai untuk dapat bekerja sama dalam mengembangkan sikap kebhinekaan peserta didik.

### 1.4.3 Segi Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pihak-pihak, sebagai berikut:

- a) Lembaga Pendidikan Formal Tingkat Sekolah Menengah Atas.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian dalam membentuk sikap kebhinekaan yang toleran pada peserta didik di lingkungan SMAS Golden Gate.

- b) Pelaku dan Pemikir Pendidikan.

Penelitian ini diharapkan menjadi kajian untuk dikembangkan dan dapat diinternalisasi dalam wujud landasan teori untuk menghasilkan wujud dari nilai karakter peserta didik yang berlandaskan kepada nilai-nilai kebhinekaan.

- c) Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Penelitian ini diharapkan kepada guru mata pelajaran PPKn dapat menggunakan landasan dalam pendidikan karakter dengan menggunakan nilai-nilai kebhinekaan, kemudian memperkuat pembelajaran sebagai landasan pembentukan nilai dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dapat diaktualisasikan dalam pembelajaran.

- d) Peserta Didik

Sebagai bagian yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran mata Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan dapat menjadi sarana dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebhinekaan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya menciptakan lingkungan sekolah yang toleran dan secara umum di lingkungan masyarakat, sehingga dengan itu dapat memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai bangsa yang super majemuk.

#### 1.4.4 Segi Isu dan Aksi Sosial

Dari segi isu dan aksi sosial, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Mengurangi aksi sosial terkait tindakan intoleransi di kalangan pelajar.
- b. Mendorong timbulnya aksi damai di kalangan pelajar.
- c. Mendorong timbulnya persatuan dan kesatuan Indonesia dalam konteks keberagaman.

#### 1.5 Struktur Organisasi Tesis

Penulisan tesis ini, peneliti menyusun sistematika penulisan karya ilmiah agar alur penelitian lebih tersistematis, terarah dan mudah dipahami, yaitu meliputi; Bab I pendahuluan, Bab II kajian pustaka, Bab III metodologi penelitian, Bab IV temuan dan pembahasan penelitian, Bab V simpulan, implikasi dan rekomendasi

Bagian pendahuluan (Bab I) adalah berupa alasan rasional mengapa penelitian ini dilaksanakan yang isinya meliputi; a) latar belakang Penelitian, b) rumusan masalah penelitian, c) tujuan penelitian, d) manfaat/signifikansi penelitian, dan e) struktur organisasi tesis.

Kajian pustaka (Bab II) yaitu berisikan tentang gambaran berbagai konsep, generalisasi dan juga teori yang akan digunakan untuk menganalisis hasil penelitian. Isinya meliputi; a) kebhinekaan Indonesia dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, b) tinjauan tentang mata pelajaran PPKn, c) pembelajaran PPKn, d) pendidikan kebhinekaan, 4) hubungan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan kebhinekaan, 5) hasil-hasil penelitian terdahulu.

Dalam metodologi penelitian (Bab III) adalah kajian tentang bagaimana metode yang digunakan dalam penelitian dilaksanakan. Bab ini akan menjelaskan secara terperinci tentang desain penelitian, partisipan penelitian dan tempat penelitian, pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, dan jadwal penelitian.

Selanjutnya pada bagian hasil penelitian dan pembahasan (Bab IV) akan disajikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dirancang dengan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan serta membahas ke dalam suatu pembahasan ilmiah dari hasil pengolahan data dan analisis data yang

menghasilkan temuan penelitian yang berkaitan, sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan menjabarkan ke dalam pembahasan dari analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti.

Kemudian pada bagian terakhir yaitu simpulan, implikasi dan rekomendasi akan berisi hasil dari penarikan kesimpulan secara umum dan khusus berdasarkan rumusan masalah pokok dan sub-sub masalah, implikasi dari penelitian dan rekomendasi berupa saran dari peneliti mengenai pembahasan yang diteliti kepada berbagai pihak terkait.